



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
PANITIA KERJA PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Kolegium Dokter Layanan Primer Indonesia; 2. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia.
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Januari 2017.
Pukul	: 13.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kebutuhan DLP yang ideal saat ini, 10 tahun yang akan datang, dan masa mendatang sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. 2. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar kontrak kerja, standar pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP. 3. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP. 4. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP.
Hadir Anggota Panja	: 16 orang dari 27 Anggota Panitia Kerja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI.
Hadir Pakar	: 1. Prof. Dr. Mohamad Sadikin/Ketua Kolegium Dokter Indonesia. 2. Prof. Dr. dr. F. Ferdinal, MS/Wakil Ketua Kolegium Dokter Indonesia.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.25 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Kolegium Dokter Indonesia, serta menampung pertanyaan, saran dari Komisi X DPR RI.

## II. CATATAN RAPAT.

### A. Kolegium Dokter Indonesia menyampaikan bahwa:

1. Prodi DLP dan Pendidikan Kedokteran: Dokter umum sekarang dididik menggunakan kurikulum Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 yang sudah memasukkan semua kompetensi Dokter Layanan Primer.
2. Prodi DLP (setara spesialis) sebagai pendidikan profesi, 80% sama dengan pendidikan profesi spesialis dokter keluarga. Karena kemiripan ini, kolegium tidak dapat dibentuk, dan lulusan Prodi DLP tidak dapat praktek sebagai dokter DLP, karena Surat Tanda Registrasi (STR) nya tidak mungkin keluar.
3. Indonesia membutuhkan sekitar 20 ribu dokter umum sebagai dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
4. Salah satu prioritas Pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap penduduk di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Prodi DLP bukan jawaban untuk itu, karena pendidikan yang lebih lama yang akan membuat orang sulit ke pusat (*perifer*). Jadi program baru (DLP) tidak menjawab masalah prioritas yang ada.
5. Lulusan Fakultas Kedokteran sudah memenuhi kualifikasi DLP sehingga muatan kurikulum tentang layanan primer dapat dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selama ini sudah berlangsung.
6. Adanya Prodi DLP terkesan merendahkan harkat dan martabat lulusan Fakultas Kedokteran yang ada, dan kemampuan dokter.

### B. Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa:

1. Secara politis, Prodi DLP merupakan amanah UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.
2. Agar para pihak yang menginginkan maupun yang tidak menginginkan adanya Prodi DLP bermusyawarah untuk menyamakan persepsi guna mencapai tujuan yang baik.
3. Mendesak Pemerintah agar segera menerbitkan PP tentang pelaksanaan UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

### C. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **15.45** WIB

**KETUA RAPAT,**



**FERDIANSYAH, S.E., M.M.** 13